

Framing Berita Kenaikan Tunjangan DPR: Analisis Etika Komunikasi Islam

Luluk Ainur Rizqiyah
UIN Sunan Ampel Surabaya
lulukainurrizqiyah@gmail.com

ABSTRACT

The increase of allowances for members of the Indonesian House of Representatives (DPR) during August 2025 triggered public debate due to perceptions of inequality and lack of transparency. Kompas.com framed this issue as a moral and social concern, emphasizing the gap between the welfare of political elites and the economic conditions of citizens. This study applies a constructivist approach and Robert N. Entman's framing analysis to explore four key elements: define problems, diagnose causes, make moral judgment, and treatment recommendation. Data were collected from news articles published on Kompas.com between August 19 and September 8, 2025. Findings reveal that Kompas.com defines the core problem as the dissonance between DPR's financial privileges and public economic realities. The media attributes the cause to structural opacity, elitist political culture, and a lack of moral empathy among legislators. Moral judgment highlights the ethical responsibility of public officials and the social implications of their decisions, framing the issue as a test of integrity and legitimacy. In terms of recommendations, Kompas.com emphasizes the need for transparency, accountability, and moral reform, urging DPR to improve communication and align policy decisions with public welfare. Overall, Kompas.com constructs narratives that not only report facts but actively shape public perception and awareness, reinforcing the media's role as a guardian of social ethics and democratic accountability. In Islamic communication ethics, the controversy over DPR allowances reflects weak 'qaulan sididan' and tabayyun as the information required corrections. The lack of transparency indicates a failure of amanah, while the delivery of the policy was seen as lacking empathy and justice (qaulan ma'rufan, al-'adl). The media plays the role of 'bisbah' by encouraging public oversight. The core issue lies in a crisis of honesty and moral sensitivity. The solution is transparency, honest clarification, and public-oriented communication.

Keywords: DPR allowances; public ethics; political accountability; Islamic communication ethics

ABSTRAK

Kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Agustus 2025 memicu perdebatan publik akibat persepsi ketimpangan dan minimnya transparansi. Kompas.com membingkai isu ini sebagai persoalan moral dan sosial, menyoroti kesenjangan antara kesejahteraan elit politik dan kondisi ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing Kompas.com dalam pemberitaan kenaikan tunjangan anggota DPR dan pengaruhnya terhadap persepsi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivisme dan analisis framing Robert N. Entman untuk mengeksplorasi empat elemen utama: *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgment*, dan *treatment recommendation*. Data dikumpulkan dari artikel berita Kompas.com yang diterbitkan antara 19 Agustus hingga 8 September 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.com mendefinisikan inti masalah sebagai ketidaksesuaian antara tunjangan DPR dan realitas ekonomi publik. Media mengidentifikasi penyebabnya pada kurangnya transparansi struktural, budaya politik elitis, dan rendahnya empati moral para legislator. Penilaian moral menekankan tanggung jawab etis pejabat publik dan implikasi sosial kebijakan mereka, membingkai isu ini sebagai ujian integritas dan legitimasi. Dalam hal rekomendasi, Kompas.com menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan reformasi moral, mendorong DPR untuk memperbaiki komunikasi publik dan menyesuaikan kebijakan dengan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, Kompas.com membangun narasi yang tidak sekadar melaporkan fakta, tetapi juga membentuk persepsi publik, menegaskan peran media sebagai pengawal etika sosial dan akuntabilitas demokrasi. Dalam etika komunikasi Islam, polemik tunjangan DPR menunjukkan lemahnya *qaulan sididan* dan *tabayyun* karena informasi perlu diralat. Minimnya transparansi mencerminkan kurangnya amanah, sementara penyampaian kebijakan dinilai kurang empatik dan berkeadilan (*qaulan*

ma'rufan, al-'adl). Media berperan sebagai hisbah dengan mendorong kontrol publik. Inti masalahnya adalah krisis kejujuran dan kepekaan moral. Solusinya: transparansi, klarifikasi jujur, dan komunikasi yang berpihak pada publik.

Kata kunci : tunjangan DPR; etika publik; akuntabilitas politik; etika komunikasi Islam.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi saat ini sangat membantu dalam penyebaran informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam masyarakat informasi, ketika era dan tren media baru berkembang, di belahan dunia manapun, ratusan atau bahkan ribuan kelompok komunitas, jaringan dukungan sosial, pekerja sosial, atau pun organisasi pemerintah telah memanfaatkan jaringan komunikasi internet untuk berbagai kepentingan. Media massa adalah saluran komunikasi yang sangat luas digunakan dan karenanya juga sangat berperan. Media massa hadir pada setiap peristiwa penting, mengamati, mencatat dan merekam, dan kemudian melaporkannya kepada publik dengan frame atau sudut pandang tertentu (Hendrik, 2021 : 118).

Kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu menjadi topik yang sensitif dan sering kali memicu kontroversi di kalangan masyarakat. Sentimen ini diperkuat oleh fakta bahwa kenaikan tunjangan sering kali terjadi di saat pemerintah menyerukan penghematan atau ketika harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi, menciptakan persepsi bahwa para pejabat negara tidak peka terhadap penderitaan rakyat (Santoso & Derung, 2024 : 432-434). Publikasi tersebut menjadi relevan karena membuka ruang diskusi mengenai proporsionalitas, kewajaran, serta efektivitas penggunaan anggaran negara, sekaligus menimbulkan wacana kritis terkait sejauh mana pengelolaan dana publik oleh lembaga legislatif sesuai dengan prinsip good governance (Budiarti, 2021 : 4). Kontroversi tunjangan DPR pada Agustus 2025 merupakan sebuah studi kasus klasik tentang kegagalan etis yang berakar pada isolasi elite dari realitas publik. Krisis ini bermula dari pernyataan Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, pada 19 Agustus 2025, yang secara keliru mengumumkan kenaikan fantastis pada berbagai tunjangan, termasuk tunjangan beras hingga 12 juta rupiah dan tunjangan bensin hingga 7 juta rupiah per bulan. Meskipun sehari kemudian ia meralat pernyataannya dan mengklaim data tersebut tidak akurat, "klarifikasi" tersebut gagal meredakan kemarahan publik (Reza, 2025 : 2). Data anggaran yang tersedia belum dipublikasikan secara terperinci (*itemized*), sehingga publik kesulitan melakukan analisis objektif terhadap setiap komponen pengeluaran. Di sisi lain, besaran tunjangan khususnya tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan serta dana aspirasi, terlampaui tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat, menimbulkan persepsi ketidakadilan (Wijaya, 2025). . Jika legitimasi parlemen terus terkikis akibat kebijakan tunjangan yang dianggap tidak transparan dan tidak akuntabel, maka wibawa konstitusional lembaga legislatif bisa melemah. Hal ini pada gilirannya berdampak pada stabilitas sistem politik secara keseluruhan (Jazmine dkk, 2025 : 3) . Namun isu tersebut juga relevan dengan judul Framing Berita Kenaikan Tunjangan DPR Pada Media Kompas.Com dimana menguraikan besaran gaji serta tunjangan anggota DPR, sehingga memunculkan perdebatan mengenai proporsionalitas dan keadilan dalam distribusi anggaran negara DPR (Reza, 2025; Rachman, 2024).

Penelitian hukum mengungkap adanya praktik penyalahgunaan tunjangan perumahan bagi anggota DPRD. Alih-alih digunakan untuk menyewa rumah sesuai peraturan, dana ini seringkali tidak dipertanggungjawabkan dengan benar. Padahal, seharusnya ada Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sebagai bukti sah agar penggunaan dana tersebut bisa diaudit secara material (Johannis dkk, 2020). Melihat gaji dan tunjangan DPR sebagai bagian dari masalah etika publik dan legitimasi demokrasi, ada keterputusan mendalam antara para elite politik dan kenyataan yang dialami masyarakat, adanya siklus yang berulang: lemahnya pengawasan menyebabkan pelanggaran oleh elite, yang kemudian memicu mobilisasi sipil dan berujung pada krisis legitimasi. Tanpa reformasi mendasar, seperti penguatan mekanisme *check and balance* dan oposisi legislatif yang berfungsi, demokrasi Indonesia

akan terus rentan terhadap impunitas elite dan ketidakpercayaan publik (Saputra 2025). Di tengah kritik ini tayangan podcast tentang gaji anggota DPR dan menemukan bahwa sebagian masyarakat menganggap besaran gaji tersebut wajar mengingat besarnya tanggung jawab dan kedudukan institusi DPR. Namun, tayangan tersebut juga memperkuat gagasan bahwa fungsi pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana sangatlah penting. (Anjani, 2023). Kontroversi terkait tunjangan parlemen pada Agustus 2025 mencerminkan kasus kritis kegagalan etika publik yang berdampak serius terhadap legitimasi demokrasi di Indonesia (Saputra, 2025). Krisis masalah dalam hukum Islam turut memperkuat kritik terhadap ketimpangan anggaran publik, khususnya ketidakseimbangan antara gaji dan tunjangan DPR dengan kesejahteraan guru (Fikri, 2025).

Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivisme dan analisis framing model Robert N. Entman. Pendekatan konstruktivisme dipilih karena fokus penelitian adalah pada bagaimana media Kompas.com dalam membentuk realitas sosial melalui narasi mengenai kenaikan tunjangan DPR. Penelitian ini menggunakan data yang dianalisis dengan mengidentifikasi dan mengkategorikan isi berita berdasarkan keempat elemen framing yang ada dalam model Entman, sehingga dapat dipahami bagaimana media membingkai isu kenaikan tunjangan DPR serta pesan apa yang disampaikan kepada publik melalui pemberitaan tersebut. Adapun analisis framing Robert N. Entman digunakan untuk menganalisis cara media membingkai berita dengan menggunakan empat perangkat utama yaitu define problems, diagnose cause, make moral judgment, dan treatment recommendation. Keempat elemen ini memungkinkan penelitian untuk menggali bagaimana narasi yang dikonstruksi dalam berita, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi opini publik. Data yang dianalisis dari pemberitaan di situs Kompas.com selama periode 19 Agustus 2025 hingga 8 September 2025.

Berdasarkan latar belakang diatas maka memperlihatkan urgensi penelitian dengan judul “Framing Berita Kenaikan Tunjangan DPR Pada Media Kompas.Com” terletak pada peran media dalam membentuk opini publik, terutama dalam konteks pendapat para figur publik. Penelitian ini penting karena membantu mengungkap pembingkai narasi dari media Kompas.com yang dapat mempengaruhi persepsi pembaca terhadap gambaran kenaikan tunjangan anggota DPR. Mengingat jika kenaikan tunjangan anggota dpr dengan kondisi masyarakat sangat terbalik merupakan hal yang sangat penting yang dapat menjadi pusat perhatian publik sehingga perlu adanya pemahaman yang dibentuk oleh media sehingga dapat relevan. Melalui konsep framing Robert N. Entman, penelitian ini menganalisis bagaimana media membingkai kasus tersebut dari realitas yang dapat mempengaruhi pandangan publik.

Hasil dan Pembahasan

Profil Kompas.com

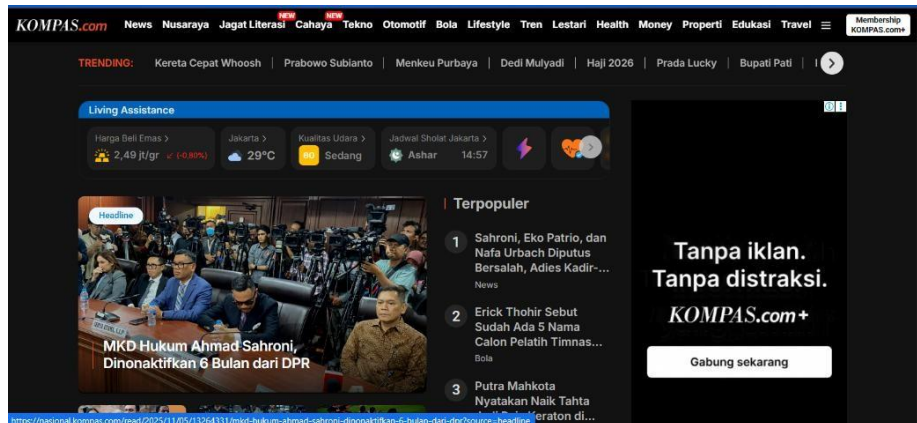
Dalam penelitian ini, subjek utama adalah berita yang disajikan di media pemberitaan online yang mengulas isu kenaikan tunjangan anggota DPR, di mana Kompas.com menjadi pilihan peneliti. Dalam era digital saat ini, portal berita daring seperti Kompas.com telah menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat Indonesia. Media ini tidak hanya menyajikan berita aktual dan faktual, tetapi juga berperan penting dalam membentuk opini publik melalui cara mereka membingkai (framing) isu-isu politik, ekonomi, dan kebijakan publik yang sensitif.

Sebagai salah satu media arus utama dengan kredibilitas tinggi, Kompas.com dikenal memiliki gaya pemberitaan yang menonjolkan pendekatan jurnalisme faktual dan moderat, berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan objektivitas redaksi. Melalui struktur beritanya yang sistematis dengan menghadirkan narasumber dari berbagai sudut pandang, baik dari pemerintah, pakar kebijakan publik, maupun masyarakat sipil Kompas.com membentuk persepsi pembaca terhadap isu yang diberitakan, termasuk dalam kasus kenaikan tunjangan DPR.

Dalam konteks pemberitaan kenaikan tunjangan DPR, visi dan misi tersebut tercermin melalui penyajian berita yang tidak hanya menampilkan data faktual, tetapi juga membuka ruang

kritik dan refleksi terhadap kebijakan publik yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat.

Tabel 1. Tampilan Situs Kompas.com



Sumber: Blog Kompas.com

Adapun berita yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, berita pertama berjudul “Framing Berita Kenaikan Tunjangan DPR Pada Media Kompas.Com” yang diterbitkan pada 26 Agustus 2025. Kasus ini bermula dari Adies Kadir mengungkapkan bahwa “Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat Rp 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari Rp 10 juta kalau tidak salah” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025). Dia menambahkan argumennya kembali “Saya kira *make sense* (masuk akal) lah kalau Rp 50 juta per bulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan enggak dapat karena dapat rumah dinas” dari pendapat inilah Partai Golkar resmi menonaktifkan Adies Kadir menonaktifkan Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar DPR (Adhyasta dan Nawir, 2025).

Konstruksi Framing Berita Kenaikan Tunjangan DPR Pada Media Kompas.Com

Konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern (Suparlan, 2019) dalam konteks framing berita, media memiliki peranan penting dalam membentuk persepsi publik terhadap identitas dan representasi DPR. Melalui konstruksi narasi dalam pemberitaan, media dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami konsep framing berita kenaikan tunjangan pada anggota DPR. Dalam hal ini, Kompas.com berperan sebagai aktor dalam membangun realitas opini publik dengan menyajikan berita yang mencerminkan perspektif tertentu. Proses pembingkai berita mengenai kenaikan tunjangan anggota DPR melibatkan tahapan seleksi, penafsiran, dan penyajian informasi yang tidak hanya merefleksikan dinamika kebijakan publik, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan sosial yang menyertainya. Melalui konstruksi narasi yang dibangun, media berperan dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap kebijakan tersebut—apakah dipersepsikan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja wakil rakyat atau justru sebagai tindakan yang tidak peka terhadap kondisi ekonomi rakyat.

Pendekatan analisis framing yang dikembangkan oleh Robert M. Entman menjadi landasan dalam penelitian ini karena model ini mampu menjelaskan bagaimana media menyeleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari suatu isu untuk membangun makna tertentu di benak khalayak. Penelitian ini menganalisis bagaimana Kompas.com membingkai isu kenaikan tunjangan DPR, serta bagaimana elemen narasi, kutipan narasumber, dan struktur berita digunakan untuk menegaskan sikap redaksional terhadap kebijakan tersebut. Pemberitaan dalam Kompas.com dikaji untuk memahami bagaimana media memaknai isu kenaikan tunjangan DPR, siapa yang dianggap sebagai penyebab permasalahan, serta nilai-nilai moral yang ditekankan dalam setiap pemberitaan. Model framing Entman terdiri atas empat perangkat utama, yaitu *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (identifikasi penyebab), *make moral judgment* (penilaian moral), dan *treatment recommendation* (rekomendasi solusi). Keempat perangkat ini digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana

Kompas.com membingkai isu kenaikan tunjangan DPR, apakah dengan menekankan sisi kebijakan yang perlu transparansi dan akuntabilitas, menyoroti ketimpangan sosial yang muncul, atau menampilkan sudut pandang pembenaran dari pihak pemerintah dan DPR sendiri. Dengan demikian, analisis framing ini diharapkan dapat memperlihatkan bagaimana konstruksi narasi media turut memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan politik dan ekonomi yang kontroversial tersebut.

Dalam perangkat framing yang dijelaskan pada model framing Robert N. Entman maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut.

1. *Define Problems* Framing Berita Kenaikan Tunjangan DPR Pada Media Kompas.Com

Dalam berita “Framing Berita Kenaikan Tunjangan DPR Pada Media Kompas.Com” yang diterbitkan pada 26 Agustus 2025. Kasus yang bermula dari Adies Kadir mengungkapkan bahwa “Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat Rp 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari Rp 10 juta kalau tidak salah” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025). Dia menambahkan argumennya kembali “Saya kira *make sense* (masuk akal) lah kalau Rp 50 juta per bulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan enggak dapat karena dapat rumah dinas” Fenomena ini didefinisikan bukan sekadar sebagai kebijakan administratif yang bersifat teknis, melainkan sebagai persoalan moral dan sosial yang menyentuh sensitivitas publik. Pada pemberitaan Kompas.com terkait kenaikan tunjangan DPR pada tanggal 26 Agustus 2025, media tidak membingkai isu ini sebagai persoalan administratif semata, melainkan sebagai masalah moral dan sosial. Kutipan pernyataan Adies Kadir tentang tunjangan Rp10–12 juta yang kemudian diusulkan menjadi Rp50 juta, dijadikan pintu masuk narasi untuk memperlihatkan kesenjangan antara argumentasi elit dan kondisi ekonomi rakyat. Melalui pemilihan isu, diksi, serta penekanan informasi, Kompas.com mendefinisikan masalah ini bukan soal nominal tunjangan, tetapi soal krisis empati, ketimpangan sosial, dan etika kebijakan publik.

Sesuai konsep framing Entman, proses *define problems* terlihat ketika Kompas.com menonjolkan realitas kontekstual yang lebih luas, seperti naiknya harga bahan pokok, belum meratanya kesejahteraan, serta ketimpangan antara kondisi rakyat dan fasilitas wakil rakyat. Media juga menghadirkan suara pengamat kebijakan publik yang menekankan pentingnya keadilan distributif dan kepekaan sosial, sehingga opini pembaca diarahkan untuk melihat bahwa keputusan DPR bukan sekadar kebijakan internal lembaga, melainkan masalah publik yang menyangkut rasa keadilan. Dalam bingkai ini, Kompas.com menempatkan inti persoalan pada hilangnya sensitivitas moral politik, bukan pada besaran tunjangan itu sendiri.

Lebih jauh, Kompas.com turut memframing bahwa persoalan ini muncul karena defisit komunikasi politik. Proses pembahasan yang dianggap tidak transparan dikaitkan dengan tumbuhnya kecurigaan publik, yang kemudian memperkuat narasi adanya krisis kepercayaan terhadap lembaga legislatif. Dengan demikian, *define problems* dalam framing Kompas.com bukan hanya mendeskripsikan apa yang terjadi, tetapi membentuk pemahaman publik tentang mengapa isu ini bermasalah. Melalui pilihan judul, diksi moderat, serta penonjolan kritik yang terukur, Kompas.com membangun posisi sebagai media profesional namun tetap kritis. Pada tahap ini, media berhasil menempatkan isu kenaikan tunjangan DPR sebagai persoalan legitimasi moral dan kepercayaan publik, bukan sekadar keputusan anggaran, sesuai dengan fungsi framing menurut Entman: menyeleksi realitas dan menekankan aspek tertentu untuk memengaruhi cara publik memahami isu.

2. *Diagnose Causes* Framing Berita Kenaikan Tunjangan DPR Pada Media Kompas.Com

Dalam berita “Framing Berita Kenaikan Tunjangan DPR Pada Media Kompas.Com” kasus yang bermula dari Adies Kadir mengungkapkan bahwa “Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat Rp 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari Rp 10 juta kalau tidak salah” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025). Dia menambahkan argumennya kembali “Saya kira *make sense* (masuk akal) lah kalau Rp 50 juta per bulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan enggak dapat karena dapat rumah dinas”. Dalam konteks pemberitaan mengenai kenaikan tunjangan

DPR, Kompas.com tidak hanya menggambarkan kebijakan tersebut sebagai fakta politik, tetapi juga membangun narasi yang menunjukkan akar permasalahan yang bersifat struktural dan sistemik di tubuh lembaga legislatif dan dalam relasinya dengan publik.

“Melalui proses framing, Kompas.com mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa polemik kenaikan tunjangan DPR bukan peristiwa terisolasi, tetapi bagian dari pola tata kelola anggaran yang tidak transparan dan minim partisipasi publik. Media menonjolkan praktik pengambilan keputusan internal yang tertutup, yang oleh Kompas.com dibingkai sebagai akar masalah dari krisis kepercayaan terhadap DPR. Dalam perspektif Entman, ini menunjukkan proses framing dengan penekanan pada sumber masalah (salience), di mana media menyoroti kurangnya akuntabilitas, empati politik, dan keterbukaan sebagai penyebab utama polemik”.

“Kompas.com juga memperkuat framing dengan menghadirkan narasi tentang budaya politik elitis yang menempatkan kepentingan pejabat di atas kepentingan publik. Melalui kutipan pengamat dan pakar kebijakan, isu ini dibingkai sebagai cerminan melebar-nya “jarak sosial” antara wakil rakyat dan masyarakat. Dalam kacamata Entman, hal ini menunjukkan bagaimana media memilih aktor dan penjelasan sebab-akibat tertentu untuk membentuk pemahaman bahwa akar polemik bukan hanya nominal tunjangan, tetapi cara berpikir kekuasaan yang abai pada tanggung jawab sosial”.

“Lebih jauh, Kompas.com memperluas framing isu ini ke ranah tata kelola demokrasi, dengan menyoroti proses penganggaran yang tertutup, lemahnya komunikasi politik, dan minimnya pengawasan antar-lembaga negara. Dengan menghadirkan fakta kontras seperti data kenaikan harga kebutuhan pokok, angka ketimpangan, dan kondisi ekonomi masyarakat, media membangun frame komparatif: kesejahteraan elite versus kesulitan rakyat. Kontras ini, dalam perspektif Entman, merupakan strategi framing untuk mengarahkan interpretasi khalayak bahwa kritik publik muncul bukan karena kebijakan teknis, melainkan karena absennya sensitivitas moral dan sosial pembuat kebijakan”.

“Framing semakin diperkuat melalui pilihan diksi di judul dan narasi seperti “menuai kritik tajam,” “kurang sensitif,” atau “minta peninjauan ulang kebijakan,” yang menurut Entman merupakan bentuk penonjolan aspek tertentu untuk memengaruhi cara isu didefinisikan dan ditafsirkan publik. Dengan pemilihan diksi dan penempatan narasumber yang terukur, Kompas.com menempatkan DPR sebagai pihak yang memicu polemik, sementara publik berada di posisi moral yang patut didengar”.

3. *Make Moral Judgement* Framing Berita Kenaikan Tunjangan DPR Pada Media Kompas.Com Dalam berita “Framing Berita Kenaikan Tunjangan DPR Pada Media Kompas.Com” kasus yang bermula dari Adies Kadir mengungkapkan bahwa “Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat Rp 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari Rp 10 juta kalau tidak salah” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025). Dia menambahkan argumennya kembali “Saya kira *make sense* (masuk akal) lah kalau Rp 50 juta per bulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan enggak dapat karena dapat rumah dinas”. Pada tahap ini, media tidak sekadar menyampaikan fakta, melainkan memberikan penilaian yang memuat unsur etis—baik secara tersurat melalui opini narasumber maupun tersirat melalui pilihan kata, diksi, dan struktur pemberitaan. Dalam konteks isu kenaikan tunjangan DPR, Kompas.com secara konsisten menunjukkan sikap moral yang berpihak pada kepentingan publik dengan menekankan pentingnya etika jabatan, empati sosial, dan tanggung jawab moral wakil rakyat terhadap konstituennya. Dalam pemberitaannya, Kompas.com menampilkan kerangka moral yang kuat dengan menempatkan isu kenaikan tunjangan bukan hanya sebagai kebijakan ekonomi, tetapi sebagai ujian integritas dan moralitas pejabat publik. Dalam berbagai artikel, media ini menyoroti pandangan para pakar dan akademisi yang menilai bahwa langkah DPR dalam menaikkan tunjangan di tengah situasi ekonomi yang sulit mencerminkan krisis sensitivitas sosial dan empati moral. Framing ini memperlihatkan upaya media untuk membangun persepsi bahwa moralitas dalam kebijakan

publik tidak hanya diukur dari aspek legalitas, tetapi juga dari ketepatan etis dan rasa keadilan sosial.

Kompas.com menggunakan strategi moral framing yang cermat dengan menampilkan dua sisi pandang: di satu sisi menghadirkan argumen DPR yang berupaya menjelaskan alasan kenaikan tunjangan sebagai penyesuaian wajar terhadap beban kerja; namun di sisi lain, media ini memberi ruang lebih besar pada suara kritis publik dan pengamat kebijakan yang menilai bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan rasa solidaritas sosial. Dengan porsi pemberitaan yang menonjolkan kritik, Kompas.com secara implisit membangun penilaian bahwa kepentingan publik harus menjadi dasar moral setiap kebijakan politik. Penekanan moral ini semakin jelas terlihat dalam pilihan diksi yang digunakan media. Istilah seperti “*tidak peka terhadap kondisi masyarakat*,” “*berlebihan*,” “*menimbulkan ketimpangan*,” dan “*berpotensi melemahkan kepercayaan publik*” menunjukkan bahwa Kompas.com menggunakan bahasa evaluatif untuk menegaskan posisi moralnya. Pilihan kata tersebut tidak bersifat netral semata, melainkan merepresentasikan *stance* moral redaksi bahwa keputusan politik harus mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan keadilan distributif. Dengan demikian, moral judgment yang dibangun tidak hanya bersumber dari nilai profesionalisme jurnanisme, tetapi juga dari nilai-nilai moral universal seperti keadilan (*justice*), tanggung jawab (*responsibility*), dan solidaritas sosial (*social empathy*).

Framing moral semakin kuat melalui pilihan kata bernada evaluatif seperti “tidak peka terhadap kondisi rakyat,” “berlebihan,” “melemahkan kepercayaan publik,” dan “menimbulkan ketimpangan.” Menurut Entman, diksi semacam ini bukan sekadar gaya bahasa, melainkan penanda posisi moral media dalam menafsirkan realitas. Melalui bahasa tersebut, Kompas.com menempatkan standar moral tertentu—yakni keadilan sosial, kepekaan publik, dan tanggung jawab kekuasaan—sebagai parameter utama dalam menilai kebijakan.

Kompas.com juga memperluas judgment moral ke level institusional, dengan menautkan isu tunjangan pada erosi legitimasi DPR sebagai representasi rakyat. Ketika kenaikan tunjangan disandingkan dengan pemberitaan tentang naiknya harga kebutuhan pokok, kesulitan ekonomi, dan turunnya daya beli, media secara implisit membangun pesan moral bahwa persoalan ini bukan hanya “tidak tepat kebijakan”, tetapi juga “tidak tepat nilai”. Dalam kerangka Entman, ini merupakan bentuk framing yang menautkan realitas fakta dengan penilaian etis, sehingga pembaca tidak hanya memahami apa yang terjadi, tetapi bagaimana seharusnya menilai peristiwa tersebut.

Melalui pendekatan tersebut, Kompas.com menjalankan peran jurnanisme sebagai penjaga moral ruang publik, bukan dengan menghakimi secara langsung, tetapi dengan menata fakta dan narasi sedemikian rupa sehingga kesimpulan moral terbentuk secara logis di benak pembaca. Dengan demikian, dalam tahap *make moral judgment*, Kompas.com membingkai isu kenaikan tunjangan DPR sebagai masalah sensitivitas moral, keadilan sosial, dan tanggung jawab politik, sekaligus mengarahkan publik untuk menilai bahwa kebijakan yang sah secara prosedural belum tentu sah secara etis jika tidak selaras dengan rasa keadilan masyarakat. Secara keseluruhan, dalam tahap *make moral judgment*, Kompas.com membingkai isu kenaikan tunjangan DPR sebagai permasalahan moralitas publik dan tanggung jawab sosial wakil rakyat. Media ini menilai bahwa kebijakan tersebut mencerminkan kegagalan dalam menjaga empati sosial, keadilan, dan legitimasi moral lembaga legislatif. Penilaian moral yang dibangun tidak sekadar mengkritik, tetapi juga mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa politik yang etis adalah politik yang berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

4. *Treatment Recommendation* Framing Berita Kenaikan Tunjangan DPR Pada Media Kompas.Com Dalam berita “Framing Berita Kenaikan Tunjangan DPR Pada Media Kompas.Com” kasus yang bermula dari Adies Kadir mengungkapkan bahwa “Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat Rp 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari Rp 10 juta kalau tidak salah” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025). Dia menambahkan argumennya kembali “Saya kira *make sense* (masuk akal) lah kalau Rp 50 juta per bulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan enggak dapat karena dapat

rumah dinas”. Kompas.com mengarahkan solusi terhadap isu kenaikan tunjangan DPR pada dua dimensi utama, yaitu transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik, serta kesesuaian moral antara keputusan politik dengan kondisi sosial masyarakat. Kedua dimensi ini menjadi dasar bagi media dalam membangun framing solusi yang berorientasi pada perbaikan sistem politik dan etika pemerintahan. Framing yang ditampilkan tidak berhenti pada kritik, tetapi juga memuat gagasan praktis dan moral yang dapat dijadikan acuan bagi lembaga legislatif untuk memperbaiki tata kelola kebijakan publik. Kompas.com menilai bahwa transparansi adalah kunci utama untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap DPR. Media ini menyoroti bahwa pengumuman kenaikan tunjangan seharusnya disertai dengan penjelasan yang terbuka dan berbasis data agar masyarakat memahami alasan dan urgensi kebijakan tersebut. Dengan menekankan prinsip *transparency in governance*, Kompas.com membingkai bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral wakil rakyat terhadap konstituennya. Dalam beberapa berita, media ini juga menggarisbawahi pentingnya mekanisme pengawasan publik, seperti konsultasi terbuka atau forum dengar pendapat, sebelum kebijakan terkait kesejahteraan pejabat ditetapkan. Dengan demikian, Kompas.com secara implisit mengajak DPR membangun tradisi politik yang akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap suara publik.

Selain transparansi, Kompas.com menekankan pentingnya keadilan sosial dan empati moral dalam setiap keputusan politik. Media ini menilai bahwa kenaikan tunjangan DPR tidak bisa dilepaskan dari realitas ekonomi masyarakat yang masih berjuang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan ketimpangan pendapatan. Oleh sebab itu, kebijakan seperti ini perlu ditunda atau ditinjau ulang hingga kondisi ekonomi lebih stabil. Kompas.com membingkai bahwa kebijakan publik harus berpijak pada prinsip keadilan sosial dan mempertimbangkan perasaan serta beban rakyat. Dalam hal ini, Kompas.com tidak sekadar mengkritik, tetapi juga menegaskan standar moral yang seharusnya dimiliki oleh pejabat publik: empati, kesederhanaan, dan kesadaran bahwa jabatan adalah amanah, bukan *privilege*.

Media ini juga mendorong adanya reorientasi nilai di tubuh DPR, agar kesejahteraan anggota dewan tidak ditempatkan di atas kesejahteraan masyarakat yang diwakili. Kompas.com melalui kutipan para pengamat politik menegaskan bahwa kepercayaan publik hanya dapat dibangun jika lembaga legislatif menunjukkan kepekaan sosial dan moralitas publik dalam setiap kebijakan. Reformasi moral menjadi bagian penting dalam rekomendasi framing Kompas.com yakni memperbaiki cara pandang elit politik terhadap kekuasaan agar selaras dengan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, Kompas.com juga menyoroti perlu adanya reformasi komunikasi publik. Menurut media ini, cara DPR menyampaikan kebijakan kenaikan tunjangan sering kali kurang sensitif dan minim penjelasan, sehingga menimbulkan persepsi negatif. Karena itu, Kompas.com menekankan perlunya strategi komunikasi yang terbuka, empatik, dan berbasis penjelasan rasional, agar publik tidak hanya menerima keputusan, tetapi juga memahami alasan di baliknya. Dalam konteks ini, komunikasi politik yang sehat menjadi bagian dari solusi jangka panjang membangun dialog antara pemerintah dan rakyat, bukan sekadar mengumumkan keputusan secara sepihak.

Kompas.com menegaskan bahwa komunikasi politik yang jujur dan proporsional merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Komunikasi yang tertutup justru memperburuk citra DPR sebagai lembaga yang jauh dari rakyat. Oleh karena itu, media ini mendorong pejabat publik untuk menggunakan pendekatan komunikasi yang berbasis empati dan transparansi. Dengan demikian, framing solusi yang ditawarkan Kompas.com tidak hanya menyentuh aspek moral dan administratif, tetapi juga strategis menata kembali hubungan antara lembaga politik dan masyarakat melalui komunikasi yang terbuka dan akuntabel.

Melalui berbagai narasi tersebut, Kompas.com mempertegas perannya sebagai media pengawal kepentingan publik dan pengarah perubahan sosial. Dalam perspektif teori tanggung jawab sosial media, sikap ini mencerminkan praktik *constructive journalism*, yaitu jurnalisme yang

tidak berhenti pada kritik, tetapi juga memberikan arah solusi dan membangun kesadaran kolektif masyarakat. Dengan menempatkan transparansi, akuntabilitas, keadilan sosial, dan empati moral sebagai dasar solusi, Kompas.com menunjukkan perannya sebagai media yang berkomitmen terhadap nilai demokrasi dan etika publik.

Framing yang dibangun Kompas.com bersifat deskriptif, normatif, sekaligus transformatif. Media ini tidak hanya menjelaskan persoalan, tetapi juga menanamkan pesan bahwa kebijakan publik yang baik harus berpihak pada rakyat dan dijalankan dengan tanggung jawab moral. Kompas.com dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, melainkan sebagai penjaga moralitas publik, yang mengingatkan pejabat negara untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan empati sosial. Melalui framing tersebut, Kompas.com berhasil menunjukkan bahwa media masih memiliki kekuatan besar dalam mengarahkan opini publik, menumbuhkan kesadaran kritis, dan memperkuat etika politik di Indonesia.

Framing Kompas.com bersifat konstruktif dan transformatif, karena tidak hanya mengkritik, tetapi juga mengarahkan pembaca pada standar ideal kebijakan publik: transparan, berkeadilan, empatik, dan berorientasi pada rakyat. Sesuai kerangka Entman, rekomendasi solusi yang ditonjolkan media bukanlah pilihan acak, melainkan bagian dari proses framing untuk membentuk persepsi bahwa perbaikan politik tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga moral dan kultural. Dengan demikian, Kompas.com menjalankan peran sebagai media yang tidak hanya mengabarkan realitas, tetapi juga mengarahkan cara publik memaknai dan membayangkan solusi bagi realitas tersebut.

Analisis Etika Komunikasi Islam

Analisis kebutuhan manusia akan komunikasi mengisyaratkan bahwa komunikasi sesungguhnya ada bersamaan dengan kehadiran manusia di muka bumi ini, bahkan sebelum manusia dilahirkan telah terjadi komunikasi antar manusia dengan penciptanya. Komunikasi tidak bisa dianggap sekedar wacana yang diperdebatkan kehadirannya, sebab segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan manusia membutuhkan komunikasi di mana komunikasi tersebut menjadi syarat utama manusia agar mampu berinteraksi dengan manusia lainnya sebagai makhluk sosial (Faridah, 2019).

Dalam perspektif etika komunikasi Islam, kasus kenaikan tunjangan DPR menunjukkan adanya problem etik dalam cara informasi dan kebijakan dikomunikasikan kepada publik. Prinsip *qaulan sidīdan* (perkataan yang benar) belum terpenuhi ketika angka tunjangan awal yang disampaikan ternyata keliru dan memerlukan ralat, menandakan lemahnya verifikasi atau tabayyun sebelum pernyataan dipublikasikan. Di sisi lain, absennya transparansi data anggaran secara rinci mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip amanah (tanggung jawab) dan menghambat publik untuk menilai kebijakan secara objektif. Secara etis, waktu dan cara penyampaian kebijakan juga tidak sejalan dengan prinsip *qaulan ma'rūfan* dan *qaulan layyīnan*, karena pengumuman kenaikan tunjangan dilakukan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang tertekan, sehingga dinilai kurang empati dan tidak sensitif secara sosial. Selain itu, dugaan lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan tunjangan menunjukkan adanya persoalan *al-'adl* (keadilan), yang bertentangan dengan tujuan komunikasi publik dalam Islam, yaitu menghadirkan *maslahah* (kemaslahatan) dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks ini, media justru menjalankan peran hisbah atau kontrol sosial dengan menyoroti ketimpangan dan menuntut transparansi, selama dilakukan berbasis data dan tanpa memicu fitnah. Secara keseluruhan, persoalan ini menegaskan bahwa inti permasalahan tidak hanya terletak pada besar kecilnya anggaran, melainkan pada krisis kejujuran, transparansi, kepekaan sosial, serta pertanggungjawaban moral dalam komunikasi kebijakan publik. Oleh sebab itu, perbaikan yang sejalan dengan etika Islam menuntut adanya keterbukaan informasi, klarifikasi yang jujur, audit yang akuntabel, serta komunikasi kebijakan yang lebih empatik, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan publik.

Penutup

Pemberitaan kenaikan tunjangan DPR oleh Kompas.com menunjukkan bagaimana media berperan penting dalam membentuk konstruksi realitas sosial dan opini publik terhadap isu politik yang sarat muatan moral dan etika. Melalui pendekatan analisis framing Robert N. Entman, Kompas.com tidak hanya menyajikan fakta-fakta terkait kebijakan kenaikan tunjangan DPR, tetapi juga menegaskan posisi moral dan sosialnya sebagai media pengawal kepentingan publik. Kompas.com mendefinisikan isu kenaikan tunjangan DPR sebagai persoalan moralitas dan sensitivitas sosial, bukan semata kebijakan administratif. Isu tersebut dibingkai sebagai bentuk ketimpangan antara kesejahteraan elit politik dan kondisi ekonomi rakyat yang masih berjuang, sehingga memunculkan pertanyaan etis mengenai kepatutan dan empati pejabat publik terhadap masyarakat yang diwakilinya. Kompas.com mengidentifikasi bahwa akar masalah tidak hanya terletak pada nominal tunjangan, tetapi juga pada kurangnya transparansi, lemahnya akuntabilitas lembaga legislatif, serta budaya politik elitis yang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik. Melalui narasi yang berlapis, struktural, kultural, dan moral. Kompas.com membangun argumentasi bahwa krisis kepercayaan publik terhadap DPR merupakan hasil dari kegagalan komunikasi politik dan defisit empati sosial di kalangan elite.

Kompas.com menilai isu ini sebagai ujian moral bagi wakil rakyat. Framing moral yang digunakan menekankan nilai-nilai etika jabatan, solidaritas sosial, dan tanggung jawab publik. Media ini secara konsisten mengangkat kritik akademisi dan pengamat yang menyoroti ketidaktepatan moral keputusan DPR dalam konteks ekonomi rakyat yang belum stabil. Dengan demikian, Kompas.com berfungsi tidak hanya sebagai pelapor peristiwa, tetapi juga sebagai penjaga moral publik yang mengedukasi masyarakat untuk menilai kebijakan politik berdasarkan prinsip keadilan dan empati sosial. Kompas.com mendorong solusi berbasis transparansi, akuntabilitas, dan reformasi moral. Media ini merekomendasikan agar DPR membuka proses penetapan kebijakan kepada publik, memperkuat mekanisme pengawasan sosial, serta memperbaiki strategi komunikasi politik agar lebih empatik dan rasional. Dengan demikian, Kompas.com tidak berhenti pada kritik, melainkan menawarkan arah perubahan menuju tata kelola politik yang lebih etis, terbuka, dan responsif terhadap rakyat.

Kompas.com membingkai isu kenaikan tunjangan DPR dengan perspektif konstruktivis, di mana media menjadi aktor yang aktif dalam membentuk persepsi dan makna publik terhadap realitas sosial. Pemberitaan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kesadaran kritis dan kontrol etika terhadap kekuasaan politik. Dengan menonjolkan nilai moralitas, transparansi, dan empati sosial, Kompas.com berhasil mempertahankan citranya sebagai media arus utama yang berkomitmen terhadap prinsip good governance dan tanggung jawab sosial jurnalisisme. Framing yang dilakukan memperlihatkan bahwa media memiliki kekuatan signifikan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan legitimasi politik, sekaligus menjadi pilar penting dalam memperkuat demokrasi yang berkeadaban di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adhyasta Dirgantara & Nawir Arsyad Akbar. *Adies Kadir Dilaporkan ke MKD, Buntut Pernyataan Viral soal Tunjangan Anggota DPR*, diakses 3 November 2023, dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/11/03/11435441/adies-kadir-dilaporkan-ke-mkd-buntut-pernyataan-viral-soal-tunjangan-anggota>.
- Anjani, M. (2023). Persepsi Mahasiswa Pada Tayangan Podcast Deddy Corbuzier Segmen “Gaji Anggota DPR” Di Youtube. Skripsi. Universitas Medan Area, Medan. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/22690>.

- Benny Johannis, Jemmy J. Pietersz, Reny Nendissa. (2020). Penggunaan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: *Lutur Law Jurnal*, 10(10), 29-30. file:///C:/Users/lenovo/Downloads/2857-Article%20Text-13682-1-10-20201130-1.pdf.
- Budiarti, R., Aqrobah, L., & Gerung, J. (2021). Ketimpangan Gaji DPR & Rakyat Akibat Demokrasi Liberal, Sebuah Perbandingan Sistem Demokrasi Dengan Islam: *Institut Muslimah Negarawan*, 4. <https://imune.id/wp-content/uploads/2021/11/ketimpangan-gaji-dpr-dan-rakyat-sebuah-perbandingan.pdf>.
- Faridah. (2019). Komunikasi dalam Interaksi Sosial (Analisis Etika Komunikasi Dalam Perspektif Islam), 1(1), 101-102. <https://www.journal.uiad.ac.id/index.php/retorika/article/download/247/164>
- Fikri, M. (2025). Krisis Masalah Dalam Hukum Islam Atas Ketimpangan Gaji Guru Dan Tunjangan DPR: A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications, 1(1), 1. <https://ejournal.bamala.org/index.php/lexi/article/view/479>.
- Hendrik, V. A. (2021). Analisis Framing Media Online Mengenai Pemberitaan Deklarasi Beny Wenda: *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, 3(4), 118. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/732>.
- Jazmine, I., dkk. (2025). Prinsip Good Governancedan Kritik atas Rasionalitas: Diskursus Pengelolaan Tunjangan Anggota DPR RI dalam Membentuk Persepsi Keadilan Publik:nMedia Hukum Indonesia, 3(4), 3. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2411>.
- Nuridin, A., Sulaeman, S., & Ridwan, M. (2022). The expression of Millennial female journalists' idealism: experiences of female journalists in Surabaya, Indonesia. *Brazilian Journalism Research*, 18(1), 214–237. <https://doi.org/10.25200/BJR.v%0n%.Y.1459>
- Rachman, F. *Berapa gaji dan Tunjangan 580 Anggota DPR yang Baru Dilantik?*, diakses 1 Oktober 2024, dari <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7567144/berapa-gaji-dan-tunjangan-580-anggota-dpr-yang-baru-dilantik>.
- Restu, G. M. (2025). Revitalisasi Kelembagaan DPR Melalui Reformasi Tata Kelola Anggaran Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Terhadap Isu Tunjangan DPR: *Jurnal Sosial Humaniora (Silatene)*, 3(1), 34. <http://jurnalsilatene.org/index.php/jsh/article/download/64/32>.
- Reza Saputra. (2025). Etika Publik dan Legitimasi Demokrasi Indonesia: Protes Tunjangan DPR, Konflik Elite, dan Respons Sipil: *Journal of State Democracy (JSD)*, 1(1), 2. <https://jurnal.cerdaspedia.com/index.php/JSD/article/view/36>.
- Santoso, K., Derung, T. (2024). Mahasiswa Menuntut Keadilan: Mengurai Aksi Demonstrasi atas Kenaikan Tunjangan Anggota DPR dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan:” *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 4(4), 432-434. <https://repository.cerdaspedia.com/index.php/repository/article/view/45>.
- Suparlan. (2019). Teori Konstruktivisme Dalam Pembelajaran: *Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 4. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/download/208/170>
- Wijaya, R. *Kenaikan Tunjangan DPR: Antara Kebutuhan Anggaran dan Tuntutan Etika Publik*, diakses 28 Agustus 2025, dari <https://www.uib.ac.id/kenaikan-tunjangan-dpr-2025/>.